

MODEL KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN ACEH UTARA

Oleh :

Asnawi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh

Aiyub

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Malikussaleh

Abstrak

Problematika kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara sangat kompleks. Faktanya penanganan kemiskinan selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran eksekutif, legislatif, dunia usaha, Perguruan Tinggi dan lembaga non pemerintah (NGOs)) pada umumnya belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan oleh pemerintah di Kabupaten Aceh Utara dan menghasilkan suatu model kebijakan yang pro pengentasan kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara. Target penelitian memberi kontribusi dalam mengatasi permasalahan kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara, memberi solusi kepada pemerintah dan pihak lainnya yang terkait dalam penyusunan kebijakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan populasi seluruh keluarga miskin dan sampel dipilih berdasarkan metode Slovin. Variabel penelitian terdiri dari *income based*, *asset based*. Analisis data menggunakan model regresi berganda. Hasil penelitian terhadap indikator *income based* dan *aset based* bahwa kebijakan pemerintah (dominan bantuan, yaitu 90 % dan lembaga non pemerintah dengan jumlah bantuan sebesar 10%). Kebijakan pengentasan kemiskinan oleh pemerintah dan lembaga non pemerintah di Kabupaten Aceh Utara, berpengaruh terhadap peningkatan *income based*, yaitu; variabel dominan yang muncul, adalah bantuan raskin, modal dan bantuan langsung tunai dan subsidi BBM. Namun pengaruh dari variabel yang dominan tersebut masih bergerak secara in-elastisitas, yaitu bantuan raskin sebesar 0,062, bantuan modal sebesar 0,996 dan bantuan langsung tunai dan subsidi BBM adalah sebesar 0,133. Sedangkan kebijakan pengentasan kemiskinan yang tidak dominan adalah bantuan rumah, dengan nilai in- elastisitas sebesar 0,133. Kebijakan pengentasan kemiskinan oleh pemerintah dan lembaga non pemerintah di Kabupaten Aceh Utara, berpengaruh terhadap peningkatan *aset based*, yaitu variabel yang dominan adalah bantuan berupa jaring, bot, zakat dan fasilitas kredit. Namun pengaruh dari variabel tersebut masih juga bergerak secara inelastis, yaitu sebesar 0,817. Sedangkan, kebijakan pengentasan kemiskinan yang tidak dominan adalah; bibit sebesar -0,007, pupuk dan obat-obatan sebesar 0,010.

Kata Kunci: Model Kebijakan, Kemiskinan.

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kemiskinan adalah suatu fenomena dan penyakit sosial dalam masyarakat sebuah negara. Dampak dari kemiskinan adalah dapat membatasi rakyat untuk memperoleh pekerjaan dan hak rakyat untuk mengakses kebutuhan hidup, selain itu dampak kemiskinan tidak dapat memperoleh pendidikan, membiayai kesehatan, pengangguran yang semakin meningkat dan kemiskinan menyebabkan masyarakat tidak mampu memenuhi pangan, sandang dan papan. Maka, usaha pengentasan kemiskinan seharusnya bertujuan mengurangi jumlah orang miskin dan kesenjangan sosial di dalam masyarakat (Hasrul Harahap, 2011). Sangat sedikit pakar di Indonesia yang mencoba merancang arah pembangunan dengan nuansa pemikiran dari belakang atau dari sudut pandang orang miskin di pedesaan.

Bila ditelaah dari sudut teori, kemiskinan ditimbulkan oleh kemiskinan natural yaitu, miskin tidak memiliki sumber daya alam. Miskin struktural adalah miskin yang diciptakan oleh struktural manajemen pengelolaan pemerintahan dalam pembangunan yang tidak tepat dan miskin warisan merupakan miskin keturunan, sejak dilahirkan sudah miskin (Oscar Lewis, Selo Sumarjan, 1977). Kabupaten Aceh Utara mempunyai angka kemiskinan tertinggi bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Aceh, yaitu sebesar 42,5 % dan memiliki sebanyak 850 desa (Aceh Utara dalam Angka, 2007-2009).

Kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara 80 % berada di daerah pedesaan. Dilematika kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara sampai saat ini masih belum tepat dicari solusi pemecahan, baik oleh pemerintah, masyarakat ataupun lembaga non pemerintah (NGOs). Dari aspek *political will* pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan peranan partai politik, termasuk partai politik *incumbent*, isu kemiskinan masih kurang mendapat perhatian dan rendahnya komitmen yang tercermin dalam agenda kebijakan pengentasan kemiskinan, sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBK), di mana program-program yang disusun oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan belum begitu berpihak kepada rakyat miskin, ini dapat memberi kesan bahwa kemiskinan memang seperti terabaikan. Implementasi dari hal tersebut dapat tergambarkan dari alokasi belanja aparatur sebesar 60 % dan 40 % untuk belanja publik (PDRB Kabupaten Aceh Utara, 2011).

Pengentasan kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga diperlukan dukungan dan komitmen berbagai pihak yang terlibat dalam program pengentasan kemiskinan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Problematika kemiskinan di Kabupaten Utara sangat kompleks. Faktanya penanganan kemiskinan selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran eksekutif, legislatif, dunia usaha, Perguruan Tinggi dan masyarakat (LSM) pada umumnya belum optimal.

Agenda yang mungkin dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, adalah dengan menawarkan model kebijakan peningkatan kesejahteraan yang meliputi program *income based*, berupa bantuan insidentil (darurat), *asset based* yang berupa pengadaan kebutuhan dasar bidang pertanian. Selanjutnya, menciptakan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas dalam penggunaan lahan, dengan usaha peningkatan teknologi, inovasi pertanian serta perluasan pemasaran hasil. Namun, dalam realita pengentasan kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara dengan berbagai kebijakan yang telah dilaksanakan belum pernah menyentuh aspek-aspek yang telah ditawarkan dan tidak terintegrasi dalam sebuah kebijakan yang komprehensif.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah kebijakan pengentasan kemiskinan dalam

bentuk *income based, asset based, employment based dan productivity based* berpengaruh terhadap upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara ?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi kebijakan pengentasan kemiskinan dan menghasilkan model kebijakan yang pro masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Utara.

Urgensi Penelitian

Adapun urgensi penelitian adalah memberikan kontribusi dalam mengatasi permasalahan pengentasan kemiskinan dan memberikan solusi kepada pemerintah daerah dan pihak-pihak lain yang terkait dalam menyusun kebijaksanaan tentang pengentasan kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara.

II. STUDI PUSTAKA

Secara umum istilah “kebijakan” atau “*policy*” digunakan untuk menunjuk perilaku seseorang aktor atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Arti dari kebijakan di atas sering digunakan untuk keperluan biasa saja, namun secara ilmiah dan sistematis memerlukan batasan-batasan atau konsep kebijakan publik yang lebih tepat.

Pengertian kebijakan publik dalam Mukli,at.al (2008:120-124), mendefinisikan kebijakan publik sebagai berikut: “*public policy whatever governments choose do or not to do*”. (kebijakan publik adalah apa saja pilihan yang di tetapkan oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak di lakukan. Thomas R. Dye (1978).

George C. Edwards III dan Ira Sharkansky (1978), mendefinsikan kebijakan publik yaitu: “*is what government say and do, It is goals and purposes of governments programs* (apa yang oleh pemerintah nyatakan dan lakukan atau tidak dilakukan, merupakan tujuan atau sasaran program pemerintah)”.

Chief J. O. Udoji (1981) melihat bahwa kebijakan publik itu perlu diikuti sanksi. Ia mengatakan “*a sanctioned course of action adressed to a particular problem or group of relacted problems tahataffect sicieted at large*” (suatu tindakan yang bersanksi mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat).

Carl I Friederick (1963), kebijakan publik merupakan tindakan yang diusulkan. Katanya, “*is proposed course of action of a person, group or government within a givern government providing abstacles and apportunities which the policy was prposed to utilize and overcome in an effort to reach agoal realize an objective or a purpose*” (suatu rangkaian tindakan yang diusulkan seseorang , kelompok, pemerintah dalam lingkungan tertentu , sesuai dengan ancaman dan tantangannya, yang diharapkan dapat memanfaatkan peluang tertentu).

Kapplan dan Laswell (1970) membuat definisi: “*public policy as a projected proggame or goalas, value and practices*” (kebijakan publik sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah).

Robert Eastone dalam Jems E. Anderson (1984) menulis definisi: “*public policy is the relationship of a government within a given environment*” (kebijkan publik adalah hubungan suatu lembaga pemerintah terhadap lingkungannya).

Carl J. Fredrick dalam J.E. Anderson (1984), menulis definisi: “*public policy si a proposed course of action of a person, group or government eithin a given environment providing obstachles and oppportunities which the policy was proposed to utilize and overcome in an effort to reach a goal or realize an objective or a purpose*” (kebijakan publik adalah suatu arah tindakan yang di usulkan pada seseorang, golongan, atau pemerintah dalam suatu lingkungan dengan suatu halangan-halangan dan kesempatan-kesempatannya, yang diharapkan dapat memenuhi dan mengatasi halangan tersebut dalam rangka mencapai cita-

cita atau mewujudkan suatu kehendak serta suatu tujuan tertentu).

Dari beragam definisi kebijakan publik tersebut, dapat kita pahami bahwa kebijakan publik (*public policy*) ditemukan karakteristik yang terkandung dalam dalam kebijakan publik yaitu : 1). Kebijakan-kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu, 2). Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah, 3). Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah 4). Kebijakan publik selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa.

Setiap kebijakan publik harus selalu berorientasi pada kepentingan publik. Dalam kaitan ini yang membedakan secara esensial antara kebijakan publik dengan kebijakan non publik terletak pada muatan kepentingan publik yang harus tercermin pada setiap kebijakan publik.

Pencerminan kepentingan publik dalam kebijakan publik tidak mudah untuk diaktualisasikan oleh para pembuat kebijakan publik, karena dalam proses pembuatan, kepentingan akan selalu mempengaruhi nuansa kebijakan publik. Pada tataran inilah seringkali kepentingan publik menjadi bias terhadap kepentingan sekelompok masyarakat. Dengan kata lain bahwa dalam setiap proses formulasi kebijakan publik akan selalu membawa implikasi yaitu ada kelompok masyarakat yang dirugikan oleh kelompok masyarakat yang diuntungkan.

Untuk menghindari adanya bias kepentingan publik dalam proses formulasi kebijakan publik tersebut maka demokratisasi dalam proses pembuatan kebijakan publik menjadi penting keberadaannya, sebab melalui proses demokratisasi, dominasi kelompok dalam formulasi kebijakan dapat dihindari.

Kebijakan publik dapat dibagi berdasarkan bentuknya menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah yang bentuknya penyediaan barang dan jasa. Sementara kelompok kedua adalah yang bentuknya regulasi. Lebih jauh lagi, kebijakan publik yang bentuknya regulasi juga dikategorikan menjadi dua, yaitu regulasi yang sifatnya infrastruktur dan yang sifatnya suprastruktur. Sementara yang termasuk kategori suprastruktur misalnya regulasi tentang transparansi, akuntabilitas dan proses perencanaan. Yang termasuk kategori infrastruktur misalnya regulasi tentang pelayanan publik dasar, alokasi anggaran (APBD), standar pendidikan dan pengentasan kemiskinan.

Kemiskinan tidak lagi hanya dianggap sebagai dimensi ekonomi melainkan telah meluas hingga kedimensi sosial, kesehatan, pendidikan dan politik. Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang sangat kompleks, bukan hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga menyangkut kerentanan dan kerawanan orang atau sekelompok orang baik laki-laki maupun perempuan untuk menjadi miskin. Cara pandang yang berbeda akan menentukan pemahaman tentang kondisi, sifat dan konteks kemiskinan, bagaimana sebab-sebab kemiskinan dapat diidentifikasi, dan bagaimana masalah kemiskinan dapat diatasi. Agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan secara tepat, hal pertama yang harus dilakukan adalah elaborasi pengertian kemiskinan secara komprehensif.

Hall dan Midgley (2004:14), menyatakan kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kondisi deprivasi materi dan sosial yang menyebabkan individu hidup di bawah standar kehidupan yang layak, atau kondisi di mana individu mengalami deprivasi relatif dibandingkan dengan individu yang lainnya dalam masyarakat.

Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Basis kekuasaan sosial meliputi (tidak terbatas pada) modal yang produktif atau assets (misalnya tanah, perumahan, peralatan, kesehatan, dan lainnya) sumber-sumber keuangan, organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama, jaringan social untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang; pengetahuan, keterampilan yang memadai dan informasi yang berguna (Friedmann, 1979: 101).

Pengertian kemiskinan memiliki dimensi meliputi ekonomi, sosial-budaya dan politik. Dimensi kemiskinan yang bersifat ekonomi memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan material manusia seperti pangan, sandang, papan dan sebagainya. Dimensi ini dapat diukur dengan nilai uang meskipun harganya akan selalu berubah tergantung pada tingkat inflasi yang terjadi. Dimensi sosial dan budaya memandang kemiskinan sebagai pelembagaan dan pelestarian nilai-nilai apatis, apolitis, fatalistik, ketidakberdayaan dan sebagainya. Dalam kategori ini, lapisan masyarakat miskin akan membentuk kantong-kantong kebudayaan kemiskinan.

Sedangkan dimensi politik melihat kemiskinan sebagai ketidakmampuan masyarakat dalam mengakses proses-proses politik karena tidak adanya lembaga yang mewakili kepentingan mereka menyebabkan terhambatnya kelompok masyarakat memperjuangkan aspirasinya. Dimensi kemiskinan berimplikasi pada upaya untuk mendefinisikan kemiskinan, termasuk ukuran-ukuran yang digunakan.

Penanggulangan kemiskinan yang selama ini terjadi memperlihatkan beberapa kekeliruan paradigmatis, antara lain pertama, masih berorientasi pada aspek ekonomi daripada aspek multidimensional. Penanggulangan kemiskinan dengan fokus perhatian pada aspek ekonomi terbukti mengalami kegagalan, karena pengentasan kemiskinan yang direduksi dalam soal-soal ekonomi tidak akan mewakili persoalan kemiskinan yang sebenarnya.

Dalam konteks budaya, orang miskin diindikasikan dengan terlembaganya nilai-nilai seperti apatis, apolitis, fatalistik, ketidakberdayaan, dan sebagainya. Sementara dalam konteks dimensi struktural atau politik, orang yang mengalami kemiskinan ekonomi pada hakekatnya karena mengalami kemiskinan struktural dan politis. Kedua, lebih bernuansa karitatif (kemurahan hati) ketimbang produktivitas.

Penanggulangan kemiskinan yang hanya didasarkan atas karitatif, tidak akan muncul dorongan dari masyarakat miskin sendiri untuk berupaya bagaimana mengatasi kemiskinannya. Mereka akan selalu menggantungkan diri pada bantuan yang diberikan pihak lain. Padahal program penanggulangan kemiskinan seharusnya diarahkan supaya mereka menjadi produktif. Ketiga, memosisikan masyarakat miskin sebagai objek daripada subjek. Seharusnya, mereka dijadikan sebagai subjek, yaitu sebagai pelaku perubahan yang aktif terlibat dalam aktivitas program penanggulangan kemiskinan. Keempat, pemerintah masih sebagai penguasa daripada fasilitator.

Dalam penanganan kemiskinan, pemerintah masih bertindak sebagai penguasa yang kerap kali turut campur tangan terlalu luas dalam kehidupan orang-orang miskin. Sebaliknya, pemerintah semestinya bertindak sebagai fasilitator, yang tugasnya mengembangkan potensi-potensi yang mereka miliki. Paradigma baru menekankan apa yang dimiliki orang miskin ketimbang apa yang tidak dimiliki orang miskin. Potensi orang miskin tersebut bisa berbentuk aset personal dan sosial, serta berbagai strategi penanganan masalah (*coping strategies*) yang telah dijalankannya secara lokal.

Kemiskinan merupakan masalah bersama yang harus ditangani secara bersama-sama pula. Meletakkan permasalahan kemiskinan semata-mata sebagai tugas dan tanggung jawab pemerintah merupakan hal yang kurang bijak. Pada faktanya, pemerintah yang sudah bergelimang kekuasaan dan kenyamanan sangat rentan dengan masalah inefisiensi, konflik kepentingan, korupsi, dan berbagai masalah lain. Sejauh ini, pemerintah masih belum mampu menuntaskan masalah-masalah tersebut. Namun, hal ini juga tidak berarti pemerintah bebas untuk melepaskan tanggung jawab dalam menyelesaikan masalah kemiskinan. Konstitusi sudah dengan jelas mengamanatkan tugas pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya, demikian juga amanat *founding fathers* yang termaktub pembukaan UUD 1945 alinea keempat sebagai visi kebangsaan Indonesia.

Dengan memahami kemiskinan sebagai persoalan yang bersifat multidimensi, maka implikasinya adalah tidak ada satupun cara atau kebijakan tunggal yang dapat menanggulangi kemiskinan. Dengan kata lain pendekatan kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak bisa parsial, melainkan harus pula bersifat multidimensi dan komprehensif. Dalam konteks ini, paparan mengenai kebijakan anggaran yang memihak pada orang miskin (*pro-poor budget*) harus dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dari sekian banyak kebijakan lain yang diperlukan untuk menanggulangi kemiskinan.

Di kebanyakan negara yang sedang membangun, kemiskinan sebagian besar dialami masyarakat di pedesaan. Hasil pengamatan McQuibria (dalam Hasibuan, 1977) mengemukakan karakteristik kemiskinan di Asia Tenggara dan Asia Selatan, adalah; (a) kemiskinan lebih banyak ditemui dipedesaan daripada perkotaan, (b) kemiskinan berkorelasi positif dengan jumlah anggota keluarga dan berkorelasi negatif dengan jumlah pekerja dalam suatu keluarga, (c) kemiskinan ditandai oleh rendahnya pemilikan aset keluarga, (d) pertanian menjadi sumber penghasilan utama bagi rumah tangga miskin, (e) kemiskinan berkaitan dengan masalah sosial budaya yang dinamis.

Robert Chambers (1983) mengungkapkan bahwa karakteristik kemiskinan berupa jebakan *deprivation trap*, yaitu (1) kemiskinan itu sendiri, (2) kelemahan fisik, (3) keterasingan, (4) kerentanan, (5) ketidakberdayaan. Kerentanan dapat dilihat dari ketidakmampuan keluarga miskin pedesaan untuk menyediakan sesuatu dalam menghadapi darurat dan kerentanan menimbulkan *poverty rackets* atau roda penggerak kemiskinan. Ketidakberdayaan, yaitu dimana para elit pedesaan yang seandainya memfungsikan diri sebagai jaring yang menjaring bantuan yang sebenarnya untuk orang miskin.

Oscar Lewis (dalam Antjok, 1995) mengemukakan kemiskinan adalah penderitaan ekonomi dalam bentuk enam kondisi, yaitu; (1) sistem ekonomi uang, buruh upahan dan sistem produksi untuk keuntungan, (2). Pengangguran dan penggangguran tenaga skil, (3) upah buruh rendah, (4) tidak berhasilnya golongan berpenghasilan rendah dalam meningkatkan status sosial, (5) sistem keluarga bilateral dan (6) masih kuatnya perangkat nilai-nilai kelas dalam masyarakat miskin.

Karakteristik kemiskinan menurut Lewis adalah lebih ditekankan pada penguasaan faktor produksi dan fenomena sosial, dimana kemiskinan pada golongan bawah sebagai buruh upahan yang tidak memiliki skil dalam bekerja, namun demikian kemiskinan juga terjadi pada golongan yang memiliki skil, tetapi tidak ada lapangan kerja yang sesuai dengan skil yang dimiliki. Kalau dilihat dari fenomena sosial karakteristik kemiskinan adalah masih kuatnya masyarakat menganut sistem kelas, dimana golongan kelas tinggi lebih banyak menguasai faktor-faktor ekonomi, karena memiliki otoritas bila dibandingkan dengan masyarakat golongan kelas rendah.

Dillon (1993) berpendapat bahwa kemiskinan adalah suatu proses, sedangkan pendapat lain mengemukakan kemiskinan adalah fenomena dalam masyarakat. Kemiskinan suatu proses yaitu kegagalan dalam mengalokasikan sumber daya secara adil atau dapat dipandang kemiskinan sebagai kegagalan kelembagaan pasar (bebas). Kemudian kemiskinan sebagai fenomena adalah ketidakmampuan sebagian masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar.

Thamrin (1999) mengemukakan penyebab kemiskinan oleh dua aspek, yaitu; (1) *market failur*, kemiskinan, terjadi karena (a) sebagian besar masyarakat desa dengan angkatan kerja yang menerima upah rendah, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup, (b) sempitnya peluang usaha di pedesaan, (c) untuk pengembangan produksi di desa tidak memadai infrastruktur, (d) pola penguasaan tanah timpang di pedesaan dan (e) pemasaran hasil komoditi pedesaan kurang lancar.

Disamping, penyebab kemiskinan dari aspek market market failur, menurut Thamrin (1999) juga ditemui penyebab kemiskinan dari aspek *political failur* yaitu apabila struktur dan lembaga ekonomi yang ada pada aras supra lokal telah menyebabkan distorsi terhadap kepentingan rakyat. Aspek potitical failur adalah terjadi penguasaan faktor-faktor produksi oleh segelintir orang dan terjadi perubahan pada peralatan produksi masyarakat dengan adanya perubahan tekonologi.

Ramli (2011) mengemukakan sebab-sebab munculnya kemiskinan, *pertama* kemiskinan kebudayaan; biasanya disebabkan oleh kesalahan pada subyeknya, seperti tidak percaya diri, malas dan tidak memiliki jiwa wiraswasta, *kedua*, kemiskinan struktural yang disebabkan oleh faktor eksternal yang melatarbelakangi kemiskinan itu sendiri, seperti pemerintah yang tidak adil, korupsi, paternalistik, birokrasi yang berbelit dan sebagainya. Isbandi Rukminto Adi di dalam Ramli (2011) menyebutkan akar kemiskinan; diantaranya, *pertama* dimensi makro mentalitas materialistic dan ingin serba cepat, *kedua* dimensi mezzo lemahnya kepercayaan sosial di dalam suatu komunitas dan organisasi, *ketiga* dimensi makro ketidakadilan pembangunan daerah yang minus (desa) dengan daerah yang surplus (kota), *keempat*, dimensi global ketidakseimbangan antar negara yang sedang berkembang dengan negara berkembang.

Upaya pengentasan kemiskinan telah dilakukan di berbagai negara, namun kemiskinan belum terkikis hingga sekarang. Ini dapat diasumsikan bahwa kebijakan dan keterlibatan dalam upaya pengentasan kemiskinan masih menggunakan kebijaksanaan yang belum tepat, sesuai dengan kondisi dan potensi mayarakat di wilayah atau negara yang menderita miskin. Antjok (1995) mengemukakan strategi pengentasan, adalah; (1) kebijakan yang menguntungkan masyarakat miskin, terutama harga produk pertanian yang memadai serta peluang kerja, (2) investasi pelayanan dalam bidang infrastruktur fisik dan sosial, (3) penyediaan teknologi bagi si miskin, (4) peran kelembagaan yang efektif, seperti; NGO dan konsultan yang memberi pelayanan untuk meningkatkan produktivitas kerja dan kualitas hidup.

Dalam upaya pengentasan kemiskinan, sebenarnya pemerintah tidak boleh sendirian sebagai institusi pelayanan, tetapi harus bersama-sama dengan merangkul NGO, akademisi, pihak swasta dan partai politik dalam menyusun suatu model kebijakan yang tepat untuk pengentasan kemiskinan agar mencapai sasaran. Kartasasmita (1996) mengemukakan perubahan pemikiran tentang pengentasan kemiskinan, yaitu; (1). Bahwa birokrasi harus dapat membangun partisipasi masyarakat yang berlandaskan kesadaran bukan paksaan, (2) membuat konsep pembangunan yang berpihak pada yang lemah dan kurang berdaya, karena konsep netral saja tidak cukup, (3) hanya bergesernya peran aparatur negara dalam mengendalikan, menjadi memberdayakan, (4) mengembangkan keterbukaan dan tanggung jawab.

III. METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Aceh Utara dengan pertimbangan daerah ini memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau disebut dengan APBK lebih besar (Rp 2,3 Triliun, tahun 2009) bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Aceh. Namun dilematika yang terjadi angka kemiskinan lebih tinggi (42,5%). Hal ini berkaitan dengan model kebijakan pengentasan kemiskinan melalui alokasi anggaran yang pro rakyat miskin.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menganut paradigma positivisme dengan pendekatan kuantitatif yang bersifat penelitian penjelasan (*explanatory research*). Logika yang dibangun dalam penelitian ini adalah logika deduktif yang berangkat dari teori ke fakta empiris berdasarkan pada pengujian teori yang terdiri dari variabel-variabel, diukur dengan angka dan dianalisis dengan prosedur statistik untuk melakukan generalisasi terhadap hasil penelitian.

Variabel Penelitian

Variabel merupakan fenomena yang dapat diukur atau diamati karena memiliki nilai atau kategori (Silalahi, 2009:132). Penelitian untuk indikator pengentasan kemiskinan *Income Based* memiliki empat variabel bebas dan satu variabel terikat. Keempat variabel terikat adalah : *Income Based (INC)*, Sedangkan variabel bebas adalah bantuan raskin (RAS), bantuan modal (MD), bantuan rumah (DFA) dan bantuan langsung tunai dan subsidi BBM (BML) Kemudian untuk indikator kemiskinan *Asset Based* memiliki satu variabel terikat, yaitu *Asset Based (AST)*, sedangkan variabel bebas adalah bantuan bibit (BBT), bantuan pupuk dan obat-obatan (PO) dan bantuan lainnya, berupa jaring, boat, zakat dan fasilitas kredit (SUB). Variabel *income based* adalah bantuan darurat yang diberikan kepada masyarakat miskin untuk mengatasi masalah sesaat karena dampak dari kebijakan publik dan situasi yang tidak menguntungkan untuk membantu meningkatkan pendapatan. *Asset based* adalah penyediaan sarana dan prasarana fisik dan non fisik bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan produksi.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh rumah tangga miskin (RTM) di Kabupaten Aceh Utara, yang tersebar di 25 kecamatan dengan jumlah 57431 rumah tangga miskin. Sampel ditentukan dengan metode Slovin (Husein Umar, 2000), dengan jumlah sampel 610

Pemilihan sampel berdasarkan probability sampling, dimana setiap elemen dari populasi mendapatkan kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Sedangkan kriteria sampel digunakan sampel acak sederhana, karena populasi relatif bersifat homogen, tersedia kerangka sampling atau kerangka populasi,

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil penyebaran questioner kepada responden dengan teknik wawancara terstruktur, sedangkan data sekunder diperoleh dengan cara studi dokumentasi yaitu dengan mempelajari berbagai dokumen resmi seperti, data Aceh Utara Dalam Angka, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D), Dokumen Anggaran (APBK), dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahunan dan lima tahunan (2007-2012) Bupati Aceh Utara.

3.6. Teknis Analisis Data

Untuk mengkaji pengaruh model kebijakan yang ditawarkan, maka analisis data menggunakan pendekatan statistik regresi berganda, yaitu:

Untuk *Income Based*, sebagai indikator pengentasan kemiskinan, yaitu:

$$INC = \alpha + \beta_1 \ln RAS + \beta_2 \ln MD + \beta_3 \ln DFA + \beta_4 \ln BML + e \quad (1)$$

di mana;

INC = *Income Based*

RAS = Bantuan Raskin

MD = Bantuan Modal

DFA = Bantuan Rumah

BML = Bantuan Darurat, berupa Bantuan Langsung Tunai, Subsidi BBM

e = error term

α = konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ dan β_4 = koefisien regresi

Untuk Aset Based, sebagai indikator pengentasan kemiskinan, yaitu:

$$AST = \alpha + \beta_1 \ln BBT + \beta_2 \ln PO + \beta_3 \ln SUB + e \quad (2)$$

di mana;

AST = Aset Based

BBT = Bantuan Bibit

PO = Bantuan Pupuk dan Obat-Obatan

SUB = Bantuan lainnya, berupa jaring, boat, zakat, dan fasilitas kredit

e = error term

α = konstanta

β_1, β_2 dan β_3 = koefisien regresi

Beberapa pertimbangan menggunakan model analisis regresi berganda karena penelitian ini lebih dari satu variabel yang digunakan untuk meramalkan satu variabel dependen. Disamping itu juga peneliti tertarik dalam memprediksi atau menganalisis skor dalam satu variabel dependen berdasarkan kombinasi kekuatan prediktif tiap-tiap variabel independen melalui perhitungan regresi berganda. Dengan demikian diharapkan kombinasi dari variabel menghasilkan prediksi yang lebih akurat dari pada hanya satu variabel. Sementara uji statistik yang digunakan adalah uji-t sampel berpasangan yang mempunyai rata-rata secara nyata.

Kerangka Pikir Penelitian

Berbagai kebijakan telah dilaksanakan secara terpadu, terukur, sinergis dan terencana serta dilandasi oleh kemitraan dan keterlibatan berbagai pihak untuk dikelola sebagai suatu gerakan bersama dalam pengentasan kemiskinan dalam jangka panjang. Kebijakan itu meliputi kebijakan ekonomi makro dan kebijakan pemenuhan hak dasar. yang merupakan landasan bagi terselenggaranya berbagai kebijakan pemenuhan hak-hak dasar. Semua diarahkan pada terwujudnya kondusifitas lingkungan bagi pengembangan usaha, dan terbukanya kesempatan seluas mungkin bagi peningkatan kapabilitas masyarakat miskin.

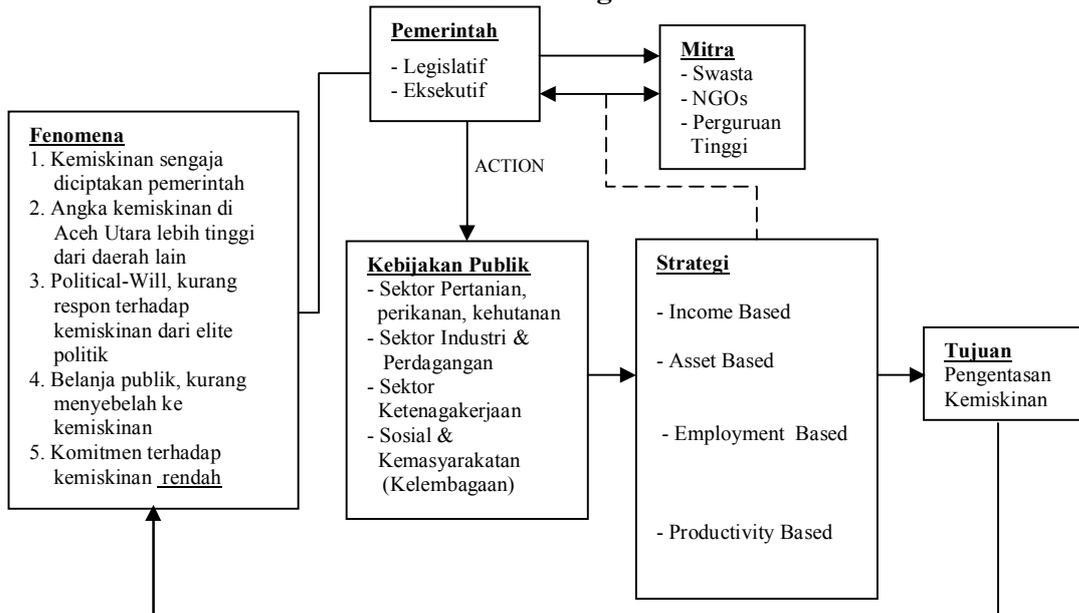
Problematika kemiskinan sangat kompleks. Faktanya penanganan kemiskinan selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran eksekutif, legislatif, dunia usaha, Perguruan Tinggi dan masyarakat (Lembaga non pemerintah) pada umumnya belum optimal. Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur.

Pemerintah kabupaten Aceh Utara bersama dengan legislatif (DPRK), memiliki peluang yang berada dalam domain kewenangannya mengeluarkan berbagai kebijakan publik terhadap masyarakat miskin dalam berbagai, sektor; yaitu sektor pertanian, perikanan dan kelautan, sektor industri dan perdagangan, sektor ketenagakerjaan dan sektor sosial dan kemasyarakatan (kelembagaan)

Kebijakan dan program pemerintah kurang efektif dalam memecahkan masalah kemiskinan dan mencegah proses pemiskinan dan pewarisan kemiskinan. Kelemahan tersebut antara lain kebijakan yang tidak berpihak kepada miskin, kebijakan bersifat sektoral, terpusat dan seolah-olah kemiskinan hanya menjadi urusan pemerintah semata dan kurangnya kolaborasi multi pihak dalam program pengentasan kemiskinan serta bersifat parsial tidak mencakup semua aspek dan dimensi.

Berikut ini ditawarkan kerangka pikir penelitian tentang Model Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara dapat di ilustrasikan seperti yang terlihat pada gambar berikut ini :

Gambar : Kerangka Pikir Penelitian



Berdasarkan strategi yang dipandang mampu untuk mengentaskan kemiskinan yaitu melalui model peningkatan kesejahteraan yang terdiri dari *income based*, *asset based*, *employment based* dan *productivity based* dengan tujuan dapat mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian tentang model kebijakan pengentasan kemiskinan di kabupaten Aceh Utara dilakukan dua periode (tahun pertama dan tahun ke dua). Untuk tahun pertama hanya dapat diselesaikan dua model dalam pengentasan kemiskinan, yaitu model *Income Based* dan *Asset Based*. Sedangkan tahun kedua model *employment based* dan *productivity based*. Berdasarkan data questioner yang diolah dengan program SPSS, hasil dari *model income based* adalah, sebagai berikut :

Tabel IV-1
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted Square	R Std. Error of the Estimate
1	.914 ^a	.836	.807	.03776

a. Predictors: (Constant), BML, RAS, DFA, MD

Tabel IV-1 dapat dijelaskan, bahwa nilai koefisien diterminasi (R adjust) didapatkan sebesar 0,807 yang berarti besarnya hubungan variabel, bantuan raskin (RAS), bantuan modal (MD), bantuan rumah (DFA) dan bantuan langsung tunai dan subsidi BBM (BML) terhadap variabel *income based* (INC) adalah sebesar 80,7 % dan selebihnya dipengaruhi oleh variabel lain diluar model. Nilai $F_{hit,0,05} = 29,289 > F_{tab,0,05} = 4,11$ ini berarti bahwa secara signifikan variabel bantuan raskin (RAS), bantuan modal (MD), bantuan rumah (DFA) dan bantuan langsung tunai dan subsidi BBM (BML) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap *income based* (INC)

Berdasarkan tabel IV-2 didapati, nilai koefisien bantuan raskin (RAS) sebesar 0,061 artinya faktor bantuan raskin (RAS) ditingkatkan 1 % dapat meningkatkan *Income Based*

sebesar 6,1 % atau koefisien bantuan raskin (RAS) berpengaruh positif dan *in-elastis* terhadap *income based*, dimana $t_{hit0,05} = 2,114 > t_{tab 0,05} = 2,052$ artinya bahwa secara signifikan variabel bantuan raskin (RAS) berpengaruh terhadap variabel *income based* (INC), dengan asumsi variabel lainnya tetap. Koefisien variabel bantuan modal (MD) sebesar 0,996 artinya 1 % peningkatan bantuan modal dapat meningkatkan *income based* (INC) sebesar 99,6 % atau dengan kata lain bantuan modal berpengaruh secara *elastis* terhadap *income based*, dimana $t_{hit0,05} = 8,126 > t_{tab0,05} = 2,052$ artinya secara signifikan bantuan modal (MD) berpengaruh terhadap *income based* (INC).

Tabel IV-2
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	β	Std. Error	Beta		
(Constant)	-2.348	2.016		-1.164	.256
RAS	.061	.029	.204	2.114	.046
MD	.996	.123	.959	8.126	.000
DFA	.014	.015	.080	.928	.363
BML	.133	.048	.307	2.744	.012

a. Dependent Variable: INC

Deskripsi pada tabel IV-2 dapat dijelaskan bahwa koefisien bantuan rumah (DFA) sebesar 0,014 artinya terjadi pengaruh secara *in-elastis* atau peningkatan bantuan rumah (DFA) sebesar 1 % hanya dapat meningkatkan peningkatan *income based* di wilayah penelitian sebesar 1,4 % atau $t_{hit0,05} = 0,928 < t_{tab0,05} = 2,052$ artinya bantuan rumah (DFA) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *income based* (INC) dan koefisien bantuan langsung tunai dan subsidi BBM (BML) adalah sebesar 0,133 artinya juga berpengaruh secara *in-elastis* terhadap peningkatan bantuan langsung tunai dan subsidi BBM (BML) di wilayah penelitian hanya sebesar 1,33 % terhadap *income based* (INC) atau $t_{hit0,05} = 2,744 < t_{tab0,05} = 2,052$ yang berarti pengaruh bantuan tunai dan subsidi BBM signifikan positif mempengaruhi *income based* (INC).

Selanjutnya, didapati hasil pengolahan data kuesioner dengan SPSS terhadap *model aset based (AST)*, dimana, pada tabel IV-3 menunjukkan hubungan daripada variabel bantuan bibit (BBT), bantuan pupuk dan obat-obatan (PO) dan bantuan berupa jaring, bot, zakat dan fasilitas kredit (SUB) terhadap aset based. Nilai koefisien determinasi (R_{adjust}) didapatkan sebesar 0,617 yang berarti bahwa besarnya hubungan variabel bantuan bibit (BBT), bantuan pupuk dan obat-obatan (PO) dan bantuan berupa jaring, bot, zakat dan fasilitas kredit (SUB) terhadap aset based sebesar 61,7 % dan selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Nilai $F_{hit0,05} = 15,501 > F_{tab} = 4,11$ ini berarti bahwa secara signifikan variabel bantuan bibit (BBT), bantuan pupuk dan obat-obatan (PO), dan bantuan berupa jaring, bot, zakat dan fasilitas kredit (SUB) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap aset based (INC).

Tabel IV-3
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
.1	.812 ^a	.660	.617	.06454

a. Predictors: (Constant), SUB, BBT, PO

Selanjutnya, pada tabel IV-4 nilai koefisien bantuan bibit sebesar -0,007 artinya jika bantuan bibit (BBT) berpengaruh negatif yang in-elastis terhadap peningkatan aset based, dimana 1 % kenaikan bantuan bibit dapat berpengaruh terhadap aset based (AST) sebesar 0,7 % atau $t_{hit0,05} = -0,057 < t_{tab0,05} = -2,052$ artinya bantuan bibit (BBT) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap aset based (AST). Koefisien bantuan pupuk dan obat-obatan (PO) dengan nilai sebesar 0,010 yaitu pengaruh yang in elastis dan positif terhadap peningkatan aset base di wilayah penelitian, dimana penambahan bantuan pupuk dan obat-obatan (PO) sebesar 1 % dapat meningkatkan penambahan aset based (AST) sebesar 1% atau $t_{hit0,05} = 0,055 < t_{tab0,05} = 2,052$ artinya bantuan pupuk dan obat-obatan (PO) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap aset based (AST).

Tabel IV-4
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	β	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.353	2.314		1.449	.160
BBT	-.007	.124	-.007	-.057	.955
PO	.010	.186	.009	.055	.957
SUB	.817	.162	.806	5.058	.000

a. Dependent Variable:
AST

Berdasarkan tabel IV-4 didapati nilai koefisien bantuan berupa jaring, bot, zakat dan fasilitas kredit (SUB) sebesar 0,817 ini berarti bahwa jika bantuan berupa jaring, bot, zakat dan fasilitas kredit (SUB) sebesar 1 % dapat meningkatkan aset based (AST) sebesar 81,7 % atau pengaruh secara positif dan elastis terhadap peningkatan aset based (AST). $t_{hit0,05} = 5,058 < t_{tab0,05} = 2,052$ artinya bantuan berupa jaring, bot, zakat dan fasilitas kredit (SUB) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap aset based (AST).

Pembahasan

Dari hasil penelitian terhadap indikator income based dan aset based bahwa kebijakan pemerintah (dominan bantuan, yaitu 90 % dan Lembaga non pemerintah dengan jumlah bantuan sebesar 10%). Namun bantuan rumah tidak begitu berpengaruh atau angka elastisitasnya sangat kecil terhadap peningkatan pendapatan masyarakat (income based) di kabupaten Aceh Utara, ini karena orientasi bantuan lebih difokuskan pada masyarakat miskin yang tidak lagi produktif, sehingga bantuan tersebut hanya menjadi aset tetap yang dapat digunakan sebagai modal untuk peningkatan produksi dalam meningkatkan pendapatan masyarakat (income based).

Bantuan raskin berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di kabupaten Aceh Utara, ini dikarenakan sehubungan dengan kenaikan harga beras yang terus meningkat, maka pengadaan bantuan beras raskin akan dapat mengurangi pengeluaran untuk konsumsi beras yang mutlak harus selalu tersedia sebagai kebutuhan pokok yang rutin. Namun angka elastisitas lebih kecil terhadap peningkatan income based (pendapatan masyarakat), ini dikarenakan bantuan raskin tidak diberikan kepada masyarakat miskin secara utuh, disebabkan adanya uang tebusan (berupa biaya transportasi dan

administrasi proses penyaluran bantuan).Selanjutnya penyaluran beras raskin sifatnya dibagi rata, sehingga tidak tepat untuk masyarakat miskin saja.

Modal usaha signifikan mempengaruhi terhadap peningkatan pendapatan (income based), namun masih in elastis pengaruhnya terhadap income based, ini dikarenakan, ini dikarenakan barang modal dari bantuan yang diberikan; (1) kurang pemerliharaan, (2) tidak optimal difungsikan untuk peningkatan produktivitas, karena diberikan secara berkelompok dan bukan secara individu. Kemudian bantuan modal yang diberikan kurang tepat sasaran, terhadap usaha yang digeluti oleh penerima bantuan modal usaha, hal ini dikarenakan, bahwa pemberian bantuan modal tidak berdasarkan studi kelayakan bisnis dengan tepat. Kemudian bantuan modal yang diberikan tidak ada monitoring dan evaluasi terhadap kondisi usaha dari modal yang diberikan.

Biaya langsung tunai dan subsidi BBM (BML) signifikan positif mempengaruhi terhadap peningkatan Income Based (INC), namun peningkatan yang in elastis. Ini dikarenakan bantuan tunai dan subsidi BBM (BML) kalau diratakan per tahun relatif kecil dan tidak sebanding dengan pengeluaran terhadap kenaikan harga barang kebutuhan pokok dan kenaikan harga minyak yang meningkat

Bibit tidak signifikan dan berpengaruh negatif terhadap peningkatan aset based, ini dikeranakan tidak selektif dalam pemberian bantuan bibit, yaitu bantuan bibit yang diberikan tidak layak untuk dijadikan bibit unggul, sehingga tumbuh atau tidak bisa pakai sebagai bibit unggul dalam peningkatan produksi. Kemudian menyangkut dengan prilaku petani yang tidak memanfaatkan bibit yang diberikan untuk ditanami. Dan kemudian bantuan bibit yang disalurkan kurang tepat kepada petani yang memiliki lahan pertanian yang cocok. Bantuan bibit yang diterima oleh petani tidak dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberian bantuan, karena kecendrungan bibit dialihkan kepemilikan lain.

Pupuk tidak signifikan mempengaruhi terhadap aset based, dengan pengaruh yang in-elastis. Ini disebabkan oleh birokarasi penyaluran pupuk yang berbelit, sehingga mempengaruhi kenaikan harga pupuk yang hampir sama dengan harga pasar. Juga kecendrungan penyaluran pupuk kepada kelompok tani, yang sayogianya bukan semua orang miskin yang menjadi anggota kelompok tani. Kemampuan penggunaan dalam pemberian pupuk masih kurang, sehingga berakibat terhadap penurunan produksi tanaman.

Bantuan berupa jaring, bot, zakat dan fasilitas kredit (SUB) juga didapati signifikan mempengaruhi kepada peningkatan asset based (AST). Namun pengaruhnya in-elastis terhadap peningkatan aset based (AST). Ini disebabkan oleh pemberian bantuan jaring kepada nelayan juga diberikan secara kelompok, dimana satu kelompok 10 orang dibantu satu unit jaring. Dimana manajemen pengelolaan jaring bantuan belum mampu mengarahkan kepada memanfaatkan jaring bantuan untuk meningkatkan produksi nelayan.

Zakat yang diberikan oleh pemerintahan desa, yang jumlahnya lebih kecil, dan sifatnya insidental. Pemberian zakat bersifat konsumtif yang tidak begitu mampu mendorong peningkatan pendapatan masyarakat. Fasilitas kredit, yang berupa kredit dalam bentuk dana bergulir (berupa dana bantuan sosial produktif) dapat meningkatkan usaha masyarakat, tapi dana bantuan tersebut juga diberikan secara kelompok dan individu, yang mampu mempengaruhi pendapatan masyarakat, karena; (1) tatakelola pinjaman kredit diurus secara manajemen keuangan yang layak, (2) anggota kelompok dan individu penerima bantuan diselektif sel.

V. PENUTUP

Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan penelitian adalah:

1. Dari hasil penelitian terhadap indikator income based dan aset based bahwa kebijakan pemerintah (dominan bantuan, yaitu 90 % dan lembaga non pemerintah dengan jumlah bantuan sebesar 10%).
2. Kebijakan pengentasan kemiskinan oleh pemerintah dan lembaga non pemerintah di Kabupaten Aceh Utara, berpengaruh terhadap peningkatan income, yaitu; variabel dominan yang muncul, adalah bantuan raskin, modal dan bantuan langsung tunai dan subsidi BBM. Namun pengaruh dari variabel yang dominan tersebut masih bergerak secara in-elastisitas, yaitu bantuan raskin sebesar 0,062, bantuan modal sebesar 0,996 dan bantuan langsung tunai dan subsidi BBM adalah sebesar 0,133. Sedangkan kebijakan pengentasan kemiskinan yang tidak dominan adalah bantuan rumah, dengan nilai in-elastisitas sebesar 0,133.
3. Kebijakan pengentasan kemiskinan oleh pemerintah dan lembaga non pemerintah di Kabupaten Aceh Utara, berpengaruh terhadap peningkatan aset based, yaitu variabel yang dominan adalah bantuan berupa jaring, bot, zakat dan fasilitas kredit. Namun pengaruh dari variabel tersebut masih juga bergerak secara inelastis, yaitu sebesar 0,817. Sedangkan, kebijakan pengentasan kemiskinan yang tidak dominan adalah; bibit sebesar -0,007 dan pupuk dan obat-obatan sebesar 0,010.

Saran

Dari hasil penelitian dapat disarankan, sebagai berikut, yaitu:

1. Untuk menjamin validitas penyediaan data tentang penduduk miskin di kabupaten Aceh Utara diperlukan data base elektronik yang dapat di up date secara berkala, jika diperlukan untuk program pengentasan kemiskinan.
2. Program bantuan modal kerja kepada masyarakat miskin harus berorientasi kepada pemberdayaan, sehingga keberdayaan penduduk miskin dapat mengurangi ketergantungan terhadap bantuan program kemiskinan atau keberadaan bantuan untuk penduduk miskin bisa lebih mandiri.
3. Untuk mempercepat pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di kabupaten Aceh Utara dimasa yang akan datang, perlu membangun kemitraan dengan pihak dunia usaha dalam penyediaan modal dan skil, pemerintah sebagai pelaksana, akademisi sebagai pencetus konsep-konsep pemikiran tentang pengentasan kemiskinan dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga yang memberikan legalitas kebijakan pengentasan kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antjok, Jamaluddin, 1995, *Pemanfaatan Organisasi Lokal Untuk Mengentaskan Kemiskinan - dalam Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*, Adytia media, Yogyakarta.
- Chambers, Robert, 1995, *Poverty and Livelihoods Whose Reality Court*, New York, NY Press.
- Dillon, HS, 1993, *Kemiskinan di Negara Berkembang: Masalah Konseptual dan Global*, Prisma No. 3-LP3ES, Jakarta.
- Friedman, John, 1979. *Urban Poverty In Latin America, Some Theoretical Consideration*. Development Dialogue, Vol 1 Upsala Dag Hommarskjold Fondation

- Hasibuan, Nurimansyah, 1997, *Kemiskinan Struktural di Indonesia: Menembus Lapisan Bawah*, Dalam Jurnal Studi Indonesia, Vol 7-Januari 1997.
- Hasrul Harahap, 2011, Bersama Melawan Kemiskinan, *Harian Waspada*, Rabu 19 Januari 2011.
- Hettne, Bjorn, 1982, *Ironi Pembangunan di Negara Berkembang*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Husein Umar, 2000, *Riset Pemasaran dan Prilaku Konsumen*, Penerbit Gramedia Pusaka Utama bekerjasama dengan Jakarta Business Research Center (JBRC), Jakarta.
- Hal Anthony dan Jame Midgley, 2004, *Social Policy for Development*, Sage Publications Ltd, London
- Korten, David, 1988, *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*, YAI, Jakarta.
- Mehmet, Ozay, 1995, *Westernizing The Third World*, Routledge, London and New York
- Muklir, at.al, 2008, *Analisis Kebijakan Publik*, Unimal Press, Lhokseumawe
- Ramli, 2011, Masalah Kemiskinan Indonesia, *Harian Waspada*, Rabu 19 Januari 2011.
- Silalahi, Ulber, 2009, *Metode Penelitian Sosial*, PT.Refika Aditama, Bandung
- Starhm, Rudolf H, 1999, *Kemiskinan Dunia Ketiga Menelaah Kegagalan Pembangunan di Negara Berkembang*, CIDES-Jakarta.
- Sumarjan, Selo, 1977, *Kemiskinan: Suatu Pandang Sosiologi*, Jurnal Sosiologi Indonesia No. 2-1977, Ikatan Sosiologi Indonesia.
- Susy Edwina, Evi Maharani dan Helmina Girsang, 2003, *Tingkat Kemiskinan Masyarakat Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru*, Jurnal Masyarakat dan Kebudayaan, Vol: 2 No. 1 Juli 2003.
- Thamrin, Juni, 1995, *Agenda Mempersempit Ketimpangan dan Kemiskinan – dalam Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*. Aditya Media. Yogyakarta.
- Tjokroaminoto, Moeljarto, 1996, *Pembangunan: Dilema dan Tantangan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.